

## BNPB TETAPKAN SUMBAR SEBAGAI PERCONTOHAN NASIONAL SATU DATA BENCANA



Sumber gambar: <https://bpbk.kotimkab.go.id/>

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai daerah percontohan nasional dalam pembentukan Forum Satu Data Bencana tingkat provinsi, untuk memperkuat pengelolaan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi.

"Forum ini menjadi langkah strategis untuk menghasilkan data kebencanaan yang valid, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan publik," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta.

Peluncuran awal (*kick off*) forum tersebut digelar di Istana Gubernur Sumbar pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, yang dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi teknis yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Forum Satu Data Bencana dibentuk untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Sementara, BNPB menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023 sebagai regulasi turunan khusus untuk sektor kebencanaan.

Menurut Abdul, Provinsi Sumbar dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki risiko dan pengalaman tinggi dalam menghadapi berbagai jenis bencana besar, seperti gempa bumi di Padang Pariaman (2009), gempa di Kepulauan Mentawai (2003), serta banjir bandang bercampur lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar (2024).

"Melalui forum ini, kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor dan menyatukan data dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana," ujarnya.

Pertemuan perdana forum dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD teknis Provinsi Sumbar, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta akademisi dari Politeknik Negeri Padang.

Agenda akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se-Sumbar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan integrasi data.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4774029/bnpb-tetapkan-sumbar-sebagai-percontohan-nasional-satu-data-bencana>, BNPB tetapkan Sumbar sebagai percontohan nasional Satu Data Bencana, 16/4/25.
2. [https://www.klikwarta.com/peluncuran-forum-satu-data-bencana-level-provinsi-di-sumbar#google\\_vignette](https://www.klikwarta.com/peluncuran-forum-satu-data-bencana-level-provinsi-di-sumbar#google_vignette), Peluncuran Forum Satu Data Bencana Level Provinsi di Sumbar, 16/4/25.
3. [https://ipol.id/2025/04/forum-satu-data-bencana-level-provinsi-sumbar-diluncurkan-agar-dapat-direplikasi-di-33-provinsi/#google\\_vignette](https://ipol.id/2025/04/forum-satu-data-bencana-level-provinsi-sumbar-diluncurkan-agar-dapat-direplikasi-di-33-provinsi/#google_vignette), Forum Satu Data Bencana Level Provinsi Sumbar Diluncurkan Agar Dapat Direplikasi di 33 Provinsi Kamis, 17/4/25.

#### **Catatan:**

Satu Data Bencana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Dalam Pasal 1 angka 4, Satu Data Bencana didefinisikan sebagai kebijakan tata kelola data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, dan disebarluaskan serta dapat dibagipakaikan melalui pemenuhan kriteria data yang ditentukan oleh BNPB.

Dalam Pasal 2 diatur bahwa data bencana terdiri atas:

- a. data prabencana;
- b. data saat tanggap darurat;
- c. data pascabencana; dan
- d. data pembiayaan penanggulangan bencana.

Selanjutnya dalam Pasal 6 diatur bahwa penyelenggara Satu Data Bencana terdiri atas:

- a. Walidata Bencana, unit kerja pada BNPB yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen Data Bencana, serta menyebarkan data (Pasal 1 angka 5); dan
- b. Produsen Data Bencana, merupakan unit kerja di lingkungan BNPB yang menghasilkan data berdasarkan tugas dan kewenangannya (Pasal 1 angka 6).

Forum Satu Data Bencana merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antara Produsen Data Bencana dan Walidata Bencana, yang dapat melibatkan instansi Pusat dan instansi daerah serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu terkait penyelenggaraan Satu Data Bencana (Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023).